

RPJPD BAUBAU 2025-2045 DIHARAPKAN BERSINERGI DENGAN PEMDA SE- KEPTON



*Suasana kegiatan pengembangan potensi ekonomi maritim di Kepulauan Buton Foto : Bardin
keratonnews.co.id*

Isi Berita:

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Baubau tahun 2025-2045 menetapkan visi pembangunan sebagai Hub Maritim di wilayah Sulawesi yang maju, berbudaya, dan berkelanjutan.

Visi pembangunan jangka panjang Kota Baubau diharapkan dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) se Kepulauan Buton (Kepton) untuk mengembangkan potensi ekonomi di bidang kemaritiman melalui optimalisasi perusahaan kemaritiman diberbagai bidang diantaranya perikanan dan budidaya maritim; transportasi dan aktivitas penunjang maritim; jasa maritim; industri pengolahan maritim; wisata bahari; serta perdagangan maritim yang memiliki potensi cukup tinggi.

Demikian dikatakan Pj Sekda Kota Baubau La Ode Fasikin mewakili Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi saat memberikan sambutan pada kegiatan pengembangan potensi ekonomi maritim di Kepulauan Buton.

“Sinergi ini demi menyamakan persepsi dari seluruh komponen penyelenggara pembangunan di Kota Baubau dan daerah kawasan Se-Kepton. Sehingga dapat mengidentifikasi isu-isu strategis dan aspek utama dalam upaya pengembangan ekonomi maritim. Termasuk memetakan tantangan dan menyusun rancang bangun agenda pembangunan di setiap sektor, serta menyusun kerangka kerja pengembangan ekonomi maritime,” kata La Ode Fasikin Jumat (19/7/2024).

Pemkot Baubau telah menetapkan laut dan kemaritiman sebagai prioritas untuk membangun kedaulatan Indonesia menjadi poros maritim dunia, dengan empat pilar pembangunan yaitu, membangun budaya maritim Indonesia, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus, membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai tiang utama, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim; mengembangkan diplomasi maritim dengan bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut.

Perwujudan Indonesia poros maritim dunia melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing bangsa digambarkan oleh 2 (dua) keadaan, yaitu pertumbuhan ekonomi maritim dan kinerja logistik.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga ilmu pengetahuan Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia di tahun 2022 mencapai 4,06%. Penghitungan kontribusi PDB maritim diperoleh dengan menghitung dari tahun 2018 sebagai tahun dasar, pada tahun 2018 nilai PDB maritim adalah Rp 1.247 triliun atau 8,40% dari PDB nasional. Pada tahun 2022 nilai ekonomi maritim menjadi sebesar Rp. 1.551 Triliun atau berkontribusi sekitar 7,92 % dari PDB Nasional.

Sumber Berita:

1. <https://keratonnews.co.id/berita/buton-roya/rpjpgd-baubau-20252045-diharapkan-bersinergi-dengan-pemda-sekepton>, “RPJPD Baubau 2025-2045 Diharapkan Bersinergi dengan Pemda se-Kepton”, 19 Juli 2024.
2. https://web.baubaukota.go.id/berita_detail/pemkot-baubau-berharap-rpjpgd-2025-2045-bersinergi-dengan-pemda-se-kepton, “Pemkot Baubau Berharap RPJPD 2025-2045 Bersinergi dengan Pemda se-Kepton”, 19 Juli 2024.

Catatan:

1. Hal ini berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Berkaitan dengan RPJMD;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada:
 - a. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD”;
 - b. Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa “RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN”.